

GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS

Abdul Hafiz Tanjung¹ Dewi Nurhasanah²

¹Universitas Nasional Pasim Bandung, Indonesia

²Universitas Nasional Pasim Bandung, Indonesia

hafiztanjung1970@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 25-07-2022

Tgl. Diterima : 11-08-2023

Tersedia Online : 30-09-2023

Keywords:

LKPD Quality, SAP, SPI

ABSTRACT

This study aims to determine the application of government accounting standards, internal control systems and the quality of local government financial reports in the Cimahi City government, as well as to test the variables of government accounting standards and internal control systems whether they have influence on the quality of local government financial reports on the Cimahi City government either partially or simultaneously. The population in this study were employees of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and the Regional Government Inspectorate of Cimahi City with a sample of 45 respondents. Methods of data collection using a questionnaire. The research method used is descriptive and associative methods. The data processing method is the SEM method, namely Partial Least Squares SEM (PLS-SEM) with the help of SmartPLS 3. The results of the study state that the application of government accounting standards and internal control systems has a significant positive effect on the quality of local government financial reports either partially or simultaneously on the government. Cimahi City.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dalam satu periode akuntansi pengelolaan keuangan negara/daerah. Oleh karenanya, laporan keuangan tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif (Munasyir, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun (2010) No. 71 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus dipenuhi dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Empat kondisi normatif berikut harus ada agar laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang dapat diterima: Relevan, Andal, Dapat

dibandingkan dan Pemahaman (Tanjung, 2012).

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Maka laporan keuangan harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Alwi et al., 2020).

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan

meningkatkan kualitas laporan keuangan, selain menggunakan SAP juga harus menerapkan Sistem Pengendalian Internal(SPI) (Sihite & Holiawati, 2017).

Pemerintah Kota Cimahi merupakan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ditunjang juga dengan SPI yang memadai dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, namun masih ada kejadian yang tidak sesuai dengan SAP dan SPI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkot Cimahi sehingga delapan kali berturut-turut Laporan Keuangan Pemkot Cimahi mendapatkan opini WTP yaitu sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan TA 2020 (jabar.antaranews.com, 2021)

Tabel 1 Opini BPK atas LKPD Kota Cimahi

Tahun	Opini BPK
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber: (jabar.antaranews.com, 2021)

Berdasarkan temuan tersebut Kualitas LKPD sudah bagus atau baik karena mendapatkan opini audit WTP, namun terbukti dari variabel SAP masih terdapat kekurangan yaitu pada tahun 2017 masih terkendala data dalam pembenahan aset, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi mengenai aset Kota Cimahi yang belum bersertifikat(cakrawalamedia.co.id, 2017). Sehingga hal inilah yang menjadikan fenomena.

Tabel 2 Fenomena SAP Pada Pemerintah Kota Cimahi

Tahun	Standar Akuntansi Pemerintahan	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2017	Aset Pemerintah kota Cimahi bersertifikat dikarenakan banyak data belum lengkap atau terkendala oleh data.	Pemerintah Kota Cimahi belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2013-2020

Sumber : (cakrawalamedia.co.id, 2017)

Fenomena yang terjadi pada Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu pada tahun 2017 penerapan SAP buruk karena kebijakan tentang aset tetap yang belum bersertifikat mencerminkan bahwa penerapan SAP belum efektif akan tetapi laporan keuangan pemerintah daerah kota Cimahi sudah masuk kualitas baik. Kejadian tersebut tidak sesuai dengan teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa penerapan SAP baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah harus baik, ataupun sebaliknya karena memiliki pengaruh positif.

Selanjutnya begitu juga dengan Sistem Pengendalian Internal Kota Cimahi masih rendah, yaitu pada tahun 2019 antara lain kegiatan atau program kerja pelaksanaannya tak sesuai jadwal serta diikuti dengan lambatnya pencairan dana. Sehingga Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Kota Cimahi berada di bawah daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Menurut Kepala Inspektorat Kota Cimahi Standar Nasional nilai SPIP harusnya 3, sedangkan pemerintah kota Cimahi memperoleh nilai 1,26 berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP). Nilai SPIP kota Cimahi sebesar 1,26 masuk klasifikasi nilai rintisan (jabarekspres.com, 2019). Sehingga hal inilah yang menjadikan fenomena.

Tabel 1 Penilaian Tingkat Maturitas SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
0	Belum Ada	0 < skor < 1,0
1	Rintisan	1,0 ≤ skor < 2,0

2 Berkembang	$2,0 \leq \text{skor} < 3,0$
3 Terdefinisi	$3,0 \leq \text{skor} < 4,0$
4 Terkelola dan Terukur	$4,0 \leq \text{skor} < 4,5$

Sumber : (inspektorat.bppt.go.id)

Tabel 4 Fenomena SPI Pada Pemerintah Kota Cimahi

Tahun	Sistem Pengendalian Internal	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2019	Kegiatan atau program kerja pelaksanaannya tak sesuai jadwal serta diikuti dengan lambatnya pencairan dana. SPIP Kota Cimahi sebesar 1,26 kategori rintisan dan dibawah daerah-daerah lain di Jawa Barat.	Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2013-2020

Sumber : (jabarekspres.com, 2019)

Fenomena yang terjadi yaitu pada tahun 2019 Sistem Pengendalian Internal yaitu buruk karena Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Kota Cimahi saat ini hanya 1,26 dengan klasifikasi nilai rintisan tetapi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik. Kejadian tersebut tidak sesuai dengan teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa SPI baik maka kualitas LKPD harus baik, ataupun sebaliknya karena memiliki pengaruh positif.

Selain adanya fenomena masih ditemukan perbedaan antara hasil penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya terdapat ketidak konsintenan dari hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah oleh (Munasyir, 2015) (Sihite & Holiawati, 2017) (Karsana & Suaryana, 2017).

Sedangkan hasil penelitian serupa menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan oleh (Yuliani & Agustini, 2016) dan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah, sistem pengendalian internal yang baik belum tentu akan meningkatkan

kualitas laporan keuangan Pemerintah (Budiawan, 2014).

Pada penelitian ini tujuannya adalah untuk menguji dan menganalisis apakah variabel SAP dan SPI berpengaruh terhadap Kualitas LKPD di Pemerintah Cimahi.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Government Accounting Standards

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun (2010) pasal 1 ayat (3) tentang SAP bahwa SAP adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Mahardini & Miranti, 2018) menyatakan bahwa ada pengaruh positif penerapan SAP terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah artinya semakin baik penerapan SAP maka akan semakin baik pula kualitas LKPD yang dihasilkan. Penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Roni et al., 2019; Sari et al., 2014; Putri et al., 2018; Jauhari & Hazisma, 2021).

Berdasarkan kerangka teoritis yang dijelaskan di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H₁: Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Internal Control System

Menurut (Zamzami & Pramesti, 2018) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun (2008) nomor 60 Sistem Pengendalian Intern adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kejajinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Astika & Yasa, 2018) menyatakan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif karena ketika SPI (Sistem Pengendalian *Intern*) diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian menurut (Kiranayanti & Erawati, 2016) (Ramadhani et al., 2019) (Aminah et al., 2019) (Trisnawati & Wiratmaja, 2018) (Kania & Tanjung, 2021) (Tanjung & Sonia, 2021).

Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut:

H₂: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Financial Report Quality

Menurut (Tanjung, 2012) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun (2010) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa: “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Menurut Munasyir (2015) menyatakan bahwa penerapan SAP dan SPI berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD, karena kualitas laporan keuangan akan menjadi baik apabila penerapan SAP dan SPIP diterapkan juga dengan baik. Penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian menurut (Sihite & Holiawati, 2017) (Sarda & Nur, 2018) (Karsana & Suaryana, 2017) (Alwi et al., 2020) (Ikyarti & Aprila, 2019) (Wulandari & Octaviani,

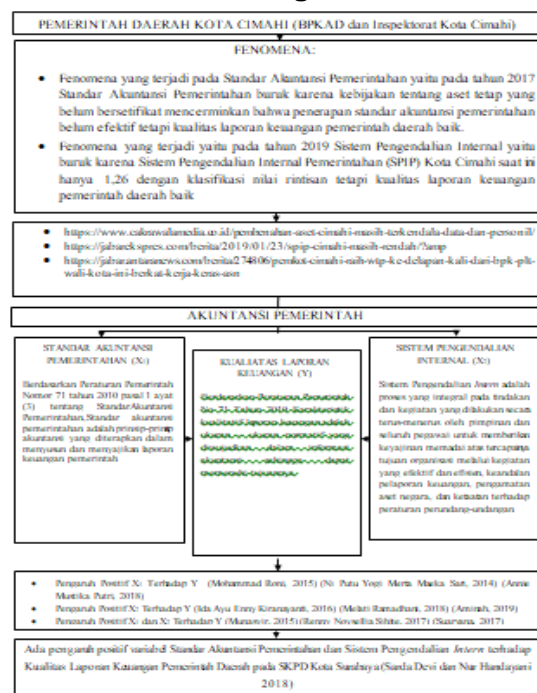
2020) (Yaqin & Jatmiko, 2018) (Eka Putra, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

H₃: Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

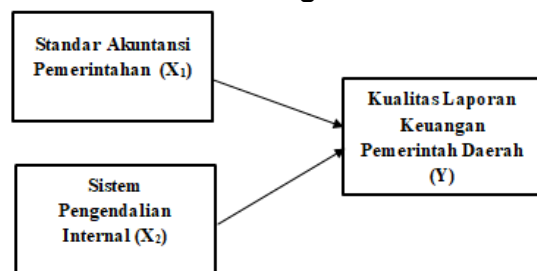
Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Adapun gambar paradigma penelitian, peneliti gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Paradigma Penelitian



Sumber: Data diolah, 2021

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berjumlah 30 orang dan Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang berjumlah 21 orang. Sehingga total populasi adalah 51 orang. Menghasilkan sampel menjadi 45 orang dengan rumus Yamane, menggunakan sampling acak berlapis sebagai teknik penarikan sampel diperoleh BPKAD berukuran 26 orang dan Inspektorat berukuran 19 orang.

Variabel – variabel dalam penelitian dioperasionalkan seperti terlihat pada gambar berikut:

Tabel 5 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Skala
Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif”.	Ordinal
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 “Sistem Pengendalian <i>Intern</i> adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” (Zamzami & Pramesti, 2018).	Ordinal
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa, “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki” (Tanjung, 2012)	Ordinal

Kuesioner tertutup adalah Instrumen penelitian dalam ini. Peneliti menggunakan teknik penskalaan *Likert* untuk mengubah respons kualitatif menjadi respons kuantitatif sebagai berikut:

Tabel 6 Skala Likert

Jawaban	Bobot
Sangat Memadai (SM) / Sangat Baik (SB)	5
Memadai (M) / Baik (B)	4
Cukup Memadai (CM) / Cukup Baik (CB)	3
Tidak Memadai (SM) / Tidak Baik (TB)	2
Sangat Tidak Memadai (STM) / Sangat Tidak Baik (STB)	1

Sumber: (Soedibjo, 2017)

Setelah mengetahui data dengan bobot skala *likert* di dalam instrumen penelitian, peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Dalam penelitian ini uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian dilakukan menggunakan PLS-SEM pada tahap awal analisis yaitu di tahap model pengukuran (*outer model*) sebagai berikut:

Pengujian Validitas:

- Uji validitas *convergent* dapat dilihat dari:
 - Nilai *loading factor* > 0,7.
 - Nilai AVE (*Average variance Extracted*) > 0,5.
- Uji validitas *discriminant* dapat dilihat dari:
 - Nilai *cross loadings* untuk setiap variabel harus > 0,7
 - Nilai *Kriteria Fornell dan Larcker*.

Pengujian Reliabilitas:

- Nilai *composite reliability* > 0,7
- Nilai *cronbach's alpha* > 0,7

Metode analisis data pada analisis deskriptif menggunakan analisis skor *actual* berdasarkan tanggapan responden terhadap kuesioner. Karena setiap variabel data dalam penelitian ini bersifat ordinal, maka nilai bobot standar dapat ditentukan dengan mengkaji panjang rentang bobot kelima klasifikasi tersebut. Berikut ini adalah klasifikasi bobot standar yang dihasilkan:

Tabel 7 Nilai Bobot Standar

Kelas Interval	Kategori
189 – 224	Sangat Memadai (SM) / Sangat Baik (SB)
153 – 188	Memadai (M) / Baik (B)

117 – 152	Cukup Memadai(N) / Cukup Baik (CB)
81 – 116	Tidak Memadai (TM) / Tidak Baik (TB)
45 – 80	Sangat Tidak Memadai (STM) / Sangat Tidak Baik (STB)

Sumber: Data diolah,2021

Pada metode analisis asosiatif pengolahan data yang digunakan adalah metode *Partial Least Squares* (PLS-SEM) dengan program *SmartPLS* 3.0. Analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran atau *outer model* dan model struktural atau *inner model*. Model pengukuran telah dibahas sebelumnya.

Pengujian *inner model* untuk mengetahui nilai R^2 (*R-Square*) pada variabel dependen sebagai kekuatan *inner model*.

Tabel 8 Pengukuran Structural Model

Nilai R^2 (<i>R Square</i>)	Keterangan
0.75	Kuat
0.50	Sedang
0,25	Lemah

Sumber:(Ghozali & Latan, 2015)

Pengujian selanjutnya memperhatikan nilai signifikansi untuk membuktikan bahwa ada pengaruh antar variabel. Dengan mengetahui nilai *parameter coefficient* dan nilai signifikansi T-Statistik melalui *prosedur bootstrapping*. Pada *Algorithm Boostsrapping Report* pilih *Path Coefficients*.

Kemudian pengujian selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui uji parsial (t) dan uji simultan (f).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian Validitas:

1. Hasil Uji Validitas *Convergent*

- a. Nilai *loading factor* untuk setiap indikator konstruk

Tabel 9 Nilai Outer Loadings

Indikator SAP (X_1)	Indikator or SPI (X_2)	Indikator or Kualitas LKPD (Y)
X1.1	0.785	X2.1 0.817 Y.1 0.668

X1.2	0.703	X2.2	0,817	Y.2	0.750
X1.3	0.870	X2.3	0,841	Y.3	0.763
X1.4	0.697	X2.4	0,564	Y.4	0.691
X1.5	0.625	X2.5	0,720	Y.5	0.646
X1.6	0.771	X2.6	0,736	Y.6	0.608
X1.7	0.626	X2.7	0,697	Y.7	0.721
X1.8	0.642	X2.8	0.692	Y.8	0.822
X1.9	0.755	X2.9	0,850		
X1.10	0.712				
X1.11	0.427				
X1.12	0.743				

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Berdasarkan tabel 8, nilai indikator *outer loadings* X1.11, X1.4, X1.5, X1.7, X1.8 dari variabel standar akuntansi pemerintah, indikator X2.4, X2.7, X2.8 dari variabel sistem pengendalian internal, dan indikator Y.1, Y.4, Y.5, Y.6 dari variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai yang kurang dari 0,7, sehingga harus dikeluarkan dari model pengukuran agar dapat memenuhi kriteria untuk mengkonfirmasi validitas konvergen. Hasil model pengukurannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Revisi Nilai Outer Loadings

Indikator SAP (X ₁)	Indikator or SPI (X ₂)	Indikator or	Kualitas LKPD (Y)
X1.1	0,833	X2.1	0,833
X1.10	0,749	X2.2	0,850
X1.12	0,718	X2.3	0,858
X1.2	0,780	X2.5	0,733
X1.3	0,922	X2.6	0,709
X1.6	0,772	X2.9	0,843
X1.9	0,682		

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Setelah pengujian kembali nilai *outer loadings* indikator X1.9 dari variabel SAP < 0,7 atau kurang dari nilai yang dapat diterima dan harus dihilangkan kembali, sehingga model pengukurannya menjadi sebagai berikut:

Tabel 11 Revisi Nilai Outer Loadings

Indikator SAP (X ₁)	Indikator or SPI (X ₂)	Indikator or	Kualitas LKPD (Y)
X1.1	0,855	X2.1	0,834
X1.10	0,742	X2.2	0,849
X1.12	0,707	X2.3	0,858
X1.2	0,813	X2.5	0,733
X1.3	0,936	X2.6	0,709
X1.6	0,755	X2.9	0,843

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Berdasarkan tabel diatas nilai *outer loadings* berada diatas 0,7 sehingga memenuhi nilai yang dapat diterima dan memenuhi syarat pengujian validitas *convergent*, sehingga semua indikator dapat dikatakan valid atau layak dilanjutkan untuk melakukan analisis berikutnya.

b. Nilai AVE (*Average Variance Extracted*)

Tabel 12 Nilai AVE

Variabel	AVE	Keterangan
SAP	0,648	Valid
SPI	0,651	Valid
Kualitas LKPD	0,642	Valid

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Data pada tabel 12 menunjukkan nilai AVE masing-masing variabel semuanya 0,5, menunjukkan bahwa konvergenya valid.

2. Hasil Uji Validitas *Discriminant*

a. Nilai *Cross Loadings*

Tabel 13 Nilai Cross Loadings

Indikator SAP (X ₁)	SPI (X ₂)	Kualitas LKPD (Y)	Keterangan	
X1.1	0,855	0,390	0,611	Valid

X1.10	0,742	0,454	0,347	Valid
X1.12	0,707	0,480	0,438	Valid
X1.2	0,813	0,216	0,522	Valid
X1.3	0,936	0,446	0,715	Valid
X1.6	0,755	0,443	0,460	Valid
X2.1	0,288	0,834	0,486	Valid
X2.2	0,322	0,849	0,375	Valid
X2.3	0,494	0,858	0,559	Valid
X2.5	0,431	0,733	0,357	Valid
X2.6	0,365	0,709	0,283	Valid
X2.9	0,463	0,843	0,419	Valid
Y.2	0,548	0,346	0,807	Valid
Y.3	0,561	0,417	0,804	Valid
Y.7	0,437	0,470	0,775	Valid
Y.8	0,572	0,470	0,819	Valid

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Nilai *cross loadings* terbesar pada variabel yang dibentuknya, dibandingkan dengan nilai *cross loadings* pada variabel lainnya dan membuktikan bahwa nilai *cross loadings* semua variabel lebih besar dari 0,7. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa telah memenuhi syarat pengujian *discriminant validity*.

b. Nilai *Kriteria Fornell dan Larcker*

Mengukur menggunakan *kriteria fornell dan larcker* dengan syarat nilai AVE dari setiap konstruk harus lebih besar dari varians bersama (korelasi kuadrat) konstruk tersebut dengan konstruk lainnya.

Tabel 14 Nilai AVE Kriteria Fornell dan Larcker

Variabel (X ₁)	(X ₂)	(Y)	Keterangan	
SAP	0,805	-	Valid	
SPI	0,489	0,807	Valid	
Kualitas LKPD	0,664	0,531	0,801	Valid

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Pada tabel 15 terlihat nilai AVE untuk masing-masing variabel memenuhi kriteria *fornell dan larcker* menunjukkan telah lulus uji validitas diskriminan.

Pengujian Reliabilitas:

1. Hasil Uji *composite reliability*

Tabel 15 Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
SAP	0,916
SPI	0,917
Kualitas LKPD	0,878

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa nilai *composite reability* setiap variabel > 0,7. Dengan demikian dapat dinyatakan setiap variabel sudah memenuhi nilai *composite reability*.

2. Hasil Uji *cronbach's alpha*

Tabel 16 Nilai *cronbach's alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
SAP	0,891
SPI	0,893
Kualitas LPD	0,814

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Dapat diketahui ditabel nilai *cronbach's alpha* > 0,7 maka setiap varibel sudah memenuhi syarat nilai *cronbach's alpha*.

Hasil Penelitian

Uji Analisis Deskriptif

Tabel 17 Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Pada Variabel SAP

Dimensi	Indikator	Skor Aktual
PSAP 01 Laporan Keuangan	Penyajian komponen laporan keuangan	205
PSAP 02 Laporan Realisasi Berbasis Kas	AnggaranLaporan realisasi anggaran	198
PSAP 03 Laporan Arus kas	Laporan arus kas	200
PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan	Penyajian CaLK	191
PSAP 05 Akuntansi Persediaan	Persediaan	183
PSAP 06 Akuntansi Investasi	Investasi	188
PSAP 07 Akuntansi Tetap	AsetPengukuran tetap	aset 181
PSAP 08 Konstruksi Pengerjaan	Akuntansi Dalam Konstruksi pengerjaan	dalam 178
PSAP 09 Akuntansi Kesalahan, Kebijakan, Perubahan, dan Operasi yang tidak dilanjutkan	Klasifikasi kewajiban Koreksi kesalahan	184
PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan, Estimasi	Koreksi kesalahan	180

PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian	LaporanLaporan keuangan konsolidasian	182
PSAP 12 Laporan Operasional	Laporan Laporan operasional	190
Total Skor Aktual Dimensi dan Indikator		2.260
Rata-rata Skor Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan		188,3

Sumber: Data diolah,2022

Berdasarkan tabel 4 di atas, dimensi “PSAP 01, PSAP 02, PSAP 03, PSAP 04, dan PSAP 12” memiliki skor aktual total > 189, menempatkannya pada kategori “Sangat Baik”, sedangkan “PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07, PSAP 08, PSAP 09, PSAP 10, dan PSAP 11” memiliki skor aktual total > 153, sehingga masuk dalam kategori “Baik”. Dapat diketahui bahwa variabel standar akuntansi pemerintah memiliki skor rata-rata aktual sebesar 188,3 dan tergolong “Baik” (lihat tabel 7).

Tabel 18 Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Pada Variabel SPI

Dimensi	Indikator	Skor Aktual
Lingkungan Pengendalian	Integritas dan nilai etika	188
	Hubungan kerja	187
Total Skor Aktual Jawaban Responden		375
Rata-rata Aktual Indikator		187,5
Penilaian Risiko	Mencegah risiko	174
	Analisis risiko	173
Total Skor Aktual Jawaban Responden		347
Rata-rata Aktual Indikator		173,5
Kegiatan Pengendalian	Pemisahan fungsi	179
	Prosedur akuntansi	183
Total Skor Aktual Jawaban Responden		362
Rata-rata Aktual Indikator		181
Informasi dan Komunikasi	Keakuratan dan keandalan informasi	173
Total Skor Aktual Jawaban Responden		173
Rata-rata Aktual Indikator dan Dimensi		173
Pemantauan	Penilaian kualitas kerja	165
	Rekomendasi hasil audit	177
Total Skor Aktual Jawaban Responden		342
Rata-rata Aktual Indikator		171
Total Skor Aktual		886
Rata-rata Skor Aktual Variabel Sistem Pengendalian Internal		177,2

Sumber: Data diolah,2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dimensi “Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan” memiliki rata-rata skor aktual > 153 maka berdasarkan nilai standar internal masuk pada kategori “Memadai”. Sehingga dapat diketahui variabel sistem pengendalian internal pada kategori “Memadai” memiliki skor

aktual rata-rata sebesar 177,2 (lihat tabel 7).

Tabel 19 Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Pada Variabel KLPD

Dimensi	Indikator	Skor Aktual
Relevan	Lengkap	207
	Tepat waktu	191
Total Skor Aktual Jawaban Responden		398
Rata-rata Aktual Indikator		199
Andal	Dapat diverifikasi	252
	Penyajian Jujur	189
Total Skor Aktual Jawaban Responden		441
Rata-rata Aktual Indikator		220,5
Dapat dibandingkan	Perbandingan secara internal	192
	Perbandingan secara Eksternal	190
Total Skor Aktual Jawaban Responden		
Rata-rata Aktual Indikator		
Dapat dipahami	Sistematis	152
	Kesesuaian istilah	156
Total Skor Aktual Jawaban Responden		308
Rata-rata Aktual Indikator		154
Total Skor Aktual		764,5
Rata-rata Skor Aktual Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		191,1

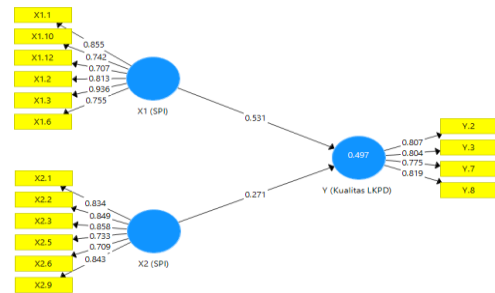
Sumber: Data diolah,2022

Dari tabel 19 diatas dapat diketahui bahwa dimensi “relevan, andal, Dapat dibandingkan” memiliki rata-rata skor aktual > 159 maka berdasarkan nilai standar internal masuk pada kategori “Sangat Baik” sedangkan dimensi “Dapat dipahami” memiliki rata-rata skor aktual 154 masuk kategori “Baik”. Sehingga dapat dikatakan variabel kualitas LKPD masuk pada kategori “Sangat Baik” memiliki skor aktual 191,1 (lihat tabel 7).

Uji Analisis Asosiatif

Pengujian analisis model struktural menggunakan metode analisis asosiatif *Partial Least Square* (PLS) untuk mengetahui pengaruh SAP dan SPI terhadap Kualitas LKPD pada Pemerintah Kota Cimahi. Hasil pengolahan data dengan program *smartPLS* 3 ditunjukkan di bawah ini.

Gambar 3 Pengaruh SAP Dan SPI Terhadap KLPD



Sumber:Data diolah smartPLS3,2022

sehingga diperoleh nilai R² (*R-Square*) seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 20 Nilai R-Square

	<i>R-Square</i>
Y (Kualitas LKPD)	0,497

Sumber:Data diolah smartPLS3,2022

Berdasarkan nilai *R-Square*, masing-masing variabel untuk kualitas laporan pemerintah daerah bernilai 0,497 atau 49,7 persen, menunjukkan bahwa akurasi model prediksi berada pada rentang sedang. Artinya variabel SAP dan SPI berpengaruh 49,7% terhadap variabel Kualitas LKPD pada pemerintah Kota Cimahi, sedangkan sisanya sebesar 50,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji *path coefficient* berikut ini menunjukkan hasil analisis pengaruh SAP terhadap Kualitas LKPD dan SPI terhadap Kualitas LKPD pada pemerintah Kota Cimahi:

Tabel 21 Path Coefficients

	Original
	Sampel (O)
X ₁ SAP → Y KLPD	0,531
X ₂ SPI → Y KLPD	0,271

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Berdasarkan hasil koefisien jalur, koefisien parameter SAP sebesar 0,531 menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kota Cimahi sebesar 53,1 persen, dan koefisien parameter sistem pengendalian internal sebesar 0,271 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil Uji Hipotesis Statistik Secara Parsial (Uji t)

Hasil pengujian hipotesis dapat digunakan untuk menanggapi hipotesis dalam penelitian ini. Jika nilai *T-Statistics* lebih besar dari 1,96 dan *P-Values* lebih kecil dari 0,005 maka hipotesis penelitian diterima dan signifikan. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis penelitian:

Tabel 22 Nilai *T-Statistic* dan *P-Values*

Hipotesis	Pengaruh	<i>T-Statistics</i> (O/STDEV)	<i>P-Values</i>	Hasil
H ₁	X ₁ → Y	5,234	0,000	Diterima
H ₂	X ₂ → Y	2,644	0,008	Diterima

Sumber: Data diolah smartPLS3,2022

Maka hipotesis H₁ membuktikan bahwa “standar akuntansi pemeritahan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” Diterima dan hipotesis H₂ membuktikan bahwa “sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” Diterima.

Hasil Uji Hipotesis Statistik Secara Simultan (Uji F)

Pada uji F dapat dikatakan signifikan secara simultan jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berikut ini adalah hasil uji F.

Tabel 23 Nilai F

Hipotesis	Pengaruh	F_{hitung}	F_{tabel}	Hasil
H ₃	X ₁ dan X ₂ → Y	21,243	3,20	Diterima

Sumber: Data diolah,2022

Sehingga hipotesis H₃ “standar akuntansi pemeritahan dan sistem pengendalian internal terdapat pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” Diterima.

Pembahasan

The Influence of the Implementation of Government Accounting Standards on the Quality of Local Government Financial Reports in the Cimahi City Government

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama dapat diterima karena nilai *P-Values* 0,000 < 0,05 dan memiliki nilai signifikan yang ditunjukkan dengan nilai *T-Statistics* sebesar 5,234 > 1,96 serta nilai koefisien parameter sebesar 0,531.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD Kota Cimahi. Dengan demikian semakin baik penerapan SAP maka semakin tinggi kualitas LKPD Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah (Sarda & Nur, 2018). Penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Munasyir, 2015) (Roni et al., 2019) (Mahardini & Miranti, 2018) (Sari et al., 2014).

The Effect of Internal Control System on the Quality of Local Government Financial Reports in the Cimahi City Government

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis kedua dapat diterima karena nilai *P-Values* 0,008 < 0,05 dan memiliki nilai signifikan yang ditunjukkan dengan nilai *T-Statistics* sebesar 2,644 > 1,96 serta nilai koefisien parameter sebesar 0,271.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa SPI berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Dengan demikian Sistem Pengendalian Internal yang semakin baik, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sarda & Nur, 2018). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah yang semakin membaik akan diikuti oleh semakin membaiknya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Munasyir, 2015) (Kania & Tanjung, 2021) (Tanjung & Sonia, 2021).

The Influence of the Implementation of Government Accounting Standards and Internal Control Systems on the Quality of Local Government Financial Reports in the Cimahi City Government

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis ketiga dapat diterima karena dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai *R-Square* 0,497 atau sebesar 49,7% artinya bahwa SAP dan SPI pemerintah secara simultan mampu berpengaruh 49,7% terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kota Cimahi dan 50,3% kualitas LKPD dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Serta dapat diketahui nilai signifikan secara simultan yang ditunjukkan dengan nilai $F_{hitung} 21,243 > F_{tabel} 3,20$.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Dengan demikian semakin besar Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kota Cimahi.

Hasil diperoleh dalam penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Surabaya (Sarda & Nur, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP dan SPI Pemerintah yang semakin baik akan diikuti oleh kualitas LKPD yang semakin baik pula. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Munasyir, 2015) (Sihite & Holiawati, 2017) (Karsana & Suaryana, 2017) (Ikyarti & Aprila, 2019) (Eka Putra, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh maupun analisis serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal yang semakin baik dapat mempengaruhi semakin baiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun secara simultan pada pemerintah kota Cimahi. Dalam Penelitian ini penerapan SAP dan SPI memiliki pengaruh sebesar 49,7 persen terhadap variabel Kualitas Laporan Pemerintah Daerah di pemerintah kota Cimahi, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 50,3 persen. Sementara itu, secara parsial SAP berpengaruh positif signifikan sebesar 53,1 persen terhadap kualitas LKPD pemerintah kota Cimahi, sedangkan SPI secara parsial berpengaruh positif signifikan sebesar 27,1 persen terhadap kualitas LKPD pemerintah kota Cimahi.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi Teoritis

Standar akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah artinya pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan memastikan bahwa penyajian laporan keuangan akurat dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan yang berlaku.

Implikasi Praktis

Bagi Pemerintah Kota Cimahi penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal untuk menghasilkan dan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan.

Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan dalam penelitian ini dalam penarikan sampelnya pada kuesioner tidak terlalu banyak sehingga sampel yang digunakan hanya 45 responden dan hanya menggunakan 2 populasi untuk penyebaran kuesioner.
2. Variabel dalam penelitian ini hanya mampu berpengaruh sebesar 49,7% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan 50,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya boleh ditambah sampel penelitiannya sehingga penyebaran kuesioner lebih meluas serta

bisa ditambah interview langsung pada setiap responden.

1. Untuk peneliti berikutnya bisa menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap LKPD misalnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas sumber daya manusia, dan Teknologi Informasi sehingga hasilnya akan lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya dan dapat memfokuskan penelitian pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini..

REFERENCES

- Alwi, A., Rimawan, M., & Pratiwi, A. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(2), 79–89.
- Aminah, A., Khairudin, K., & Indrayenti, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 22–33.
- Astika, I. B. P., & Yasa, G. W. (2018). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 301–325.
- Atiningsih, S. (2020). The Implementation Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems And Information Technology Utilization On The Quality Of Local Government Financial Statements With Organizational Commitments As Moderation Variables. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(02), 216–229.
- Budiawan, D. A. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi*

- Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Eka Putra, W. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jambi)(Analysis of Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements (Empirical Study of the Jambi City Government)). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jambi)*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2), 282–293.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. In *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Jauhari, H., & Hazisma, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104–121.
- Kania, K., & Tanjung, A. H. (2021). The Effect of Accounting Information Systems and Internal Control Systems on The Quality of Financial Statements at BPKAD. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 5(1), 85–97.
- Karsana, I. W., & Suaryana, I. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 643–670.
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290–1318.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22–32.
- Munasyir. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 4(4), 23–35.
- Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Binangkit, I. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 250–260.
- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2019). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Roni, M., Husnan, L. H., & Fitriah, N. (2019). Determinan Kualitas Laporan

- Keuangan Satuan Kerja Di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(2), 175–187.
- Sarda, D., & Nur, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(3).
- Sari, N. P. Y. M. M., Adiputra, I. M. P., SE, S. H., & Edy Sujana, S. E. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Sihite, R. N., & Holiawati, H. (2017). Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(2), 81–92.
- Soedibjo, B. S. (2017). *Pengantar Metode Penelitian*. Universitas Nasional Pasim.
- Tanjung, A. H. (2012). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Alfabeta.
- Tanjung, A. H., & Sonia, W. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(1), 24–37.
- Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN, 2302–8556.
- Wulandari, D. R., & Octaviani, A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *AKTUAL*, 5(1).
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1–10.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64.
- Zamzami, F., & Pramesti, A. E. (2018). *Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah daerah*. UGM PRESS.